

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Ekstrakurikuler

a. Pengertian Ekstrakurikuler

Sesuai Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa, ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, dibawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional..

★ Kegiatan di luar kurikulum inti yang dilakukan siswa atas kemauan sendiri. Arikunto dalam Suryosubroto (2002:271) menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler. Wiyani (2013:107) menambahkan bahwa kegiatan di luar kelas adalah kegiatan yang membantu siswa tumbuh dengan cara yang relevan dengan mata pelajaran yang ada, seperti kemampuan untuk mempraktikkan pengetahuan teoretis.

Sedangkan kriteria kegiatan ekstrakurikuler dibahas dalam makalah yang disampaikan pada *International Conference on Engineering Education, Season T4TK, Purdue University, Departement of*

Engeneering Edu-cation, West Lafayette sebagai berikut.

...an activity is considered extracurricular if it satisfies the following criteria: (1) not a re-quirement for graduation; (2) voluntary participation; (3) structured; participant meet regularly in a context specific to the activity; (4) requires effort; it must pose some measure of challenge to the individual engaged in the activity (Dalrymple & Evangelou, 2006: 3).

Makalah ini menjelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler sebagai kegiatan yang (1) tidak diwajibkan untuk kelulusan, (2) melibatkan sukarelawan siswa, (3) terstruktur sehingga siswa bertemu secara teratur di tempat yang sama untuk melaksanakan kegiatan, dan (4) mengharuskan siswa upaya dan harus setidaknya agak sulit bagi siswa yang terlibat. Keempat ciri ini sangat penting untuk membantu siswa mengembangkan kesadaran sosial, kecakapan akademik, dan dorongan untuk menghadapi tantangan sulit dalam mengejar tujuan pribadi sendiri.

Anugrah, dkk (2019; 92) Ekstrakurikuler adalah kegiatan dalam mengembangkan karakter untuk meningkatkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara maksimal (Permendikbud No 20 Tahun 2018). Ekstrakurikuler menjadi dua, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan (Jalil, 2018:130).

Dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilaksanakan diluar jam pelajaran, dengan tujuan untuk menambah pengetahuan peserta didik, sebagai wahana penyaluran minat dan bakat peserta didik, dan sebagai pelengkap pendampingan dan pembinaan pada peserta didik.

2. Tujuan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler memiliki tujuan untuk mengisi waktu luang peserta didik setelah menerima pembelajaran di kelas. Menurut Umam (2013:93) menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya bermanfaat bagi pelajar dalam mengisi waktu luang tetapi juga ditujukan untuk pembentukan perilaku sosial seperti kerjasama, kemurahan hati, persaingan, empati, sikap tidak mementingkan diri sendiri, sikap ramah, memimpin dan mempertahankan diri. Pembentukan perilaku sosial terbentuk seiring dengan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Sementara itu menurut Nasrudin (2010:12), tujuan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta didik bisa meningkatkan serta mendiversifikasi pemahaman tentang keterkaitan disiplin ilmu, memfokuskan kekuatan dan minat, dan sepenuhnya terlibat dalam proses menjadi manusia seutuhnya:
 - a. Beriman dan sembahlah Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Esa
 - b. Berbudi pekerti luhur
 - c. Memiliki Pengetahuan dan Kemampuan
 - d. kesehatan, jasmani, dan rohani
 - e. Kemandirian yang jantan dan mandiri
 - f. memiliki rasa tanggung jawab sipil dan negara
- 2) Peserta didik dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari di kelas pada kepribadian dan keadaan unik mereka berkat pendidikan karakter.

Untuk menjadi anggota masyarakat yang beradab, siswa membutuhkan waktu dan ruang di luar kelas untuk menumbuhkan potensi intelektual dan pribadi sepenuhnya. Untuk itulah diadakan kegiatan ekstrakurikuler.

b. Jenis-jenis Ekstrakurikuler

Pada Permendikbud No. 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler di SD dan SMA sebagaimana dikutip Suhaeli (2017:8) menetapkan kegiatan ekstrakurikuler:

- 1) kegiatan ekstrakurikuler wajib, dan
- 2) kegiatan ekstrakurikuler pilihan.

Kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler wajib yang dimaksudkan adalah berbentuk pendidikan kepramukaan. Ekstrakurikuler pilihan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dirancang dan diselenggarakan oleh sekolah untuk memenuhi kekuatan dan minat individu individu. Ekstrakurikuler ini dirancang untuk mengasah keterampilan khusus dan memupuk minat tertentu.

2. Kepramukaan

a. Pengertian Gerakan Pramuka

Organisasi Pramuka adalah organisasi pendidikan kepemudaan yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan dengan bantuan dan kepemimpinan anggota dewasa, sebagaimana dikemukakan oleh

Aqib dan Sujak (2011: 81). Selain lembaga pendidikan tradisional (yaitu, rumah, ruang kelas, tempat kerja, dan masyarakat luas), gerakan Pramuka juga berfungsi sebagai sumber pendidikan yang penting. Mereka lebih lanjut mengklaim bahwa kepramukaan adalah proses pendidikan yang berlangsung dalam bentuk kegiatan luar ruangan yang mengasyikkan dan menarik yang bukan merupakan bagian dari rutinitas sekolah atau rutinitas rumah.

Namun demikian, pendidikan kepramukaan pada hakikatnya adalah:

(1) proses pendidikan berupa kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan remaja di bawah tanggung jawab orang dewasa, (2) dilakukan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan di luar lingkungan pendidikan keluarga, (3) di lingkungan pendidikan keluarga, dan (4) menggunakan prinsip dan metode dasar (Rahmat, 2010:10).

Menurut Asrivi (2020) UU RI No.12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka , pendidikan kepramukaan adalah pendidikan informal yang mengajarkan nilai-nilai kepramukaan dan diselenggarakan dengan cara kepramukaan. Prinsip-prinsip Kepramukaan Satya dan Darma sedang dibahas. Namun, pendekatan yang dibahas di sini adalah pembelajaran partisipatif terbuka di bawah pengawasan seorang ahli. Gerakan pramuka merambah ke ruang kelas siswa dari segala usia, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Pramuka Siaga dan Penggalang bersekolah di SD

dan duduk di kelas empat, lima, dan enam. Setelah seminggu mengikuti pelajaran, sekolah dasar sering mengadakan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Kegiatan ekstrakurikuler, seperti yang didefinisikan oleh Uzer dan Lilis dalam Inriyani et al. (2016: 3), adalah hal-hal yang melibatkan siswa baik di dalam maupun di luar kelas untuk menambah dan memperluas keterampilan dan pengetahuan akademik yang mereka peroleh di lingkungan kelas tradisional.

Dengan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan kepramukaan adalah praktik penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, teratur, terarah, yang dilaksanakan di alam terbuka bertujuan memberikan pendidikan moral, membentuk kepribadian, dan mengembangkan akhlak mulia di dalam masyarakat anggotanya melalui PDMPK.

b. Tujuan Gerakan Pramuka

Prinsip dan tujuan kegiatan kepramukaan dijelaskan oleh Mursitho (2010: 16) yang menulis bahwa (a) prinsip setiap anggota Gerakan Pramuka adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila yang diwujudkan dalam setiap sikap dan perilaku sehari-hari, dan (b) gerakan kepanduan bertujuan untuk mendidik dan membina pemuda Indonesia agar menjadi anggota masyarakat yang produktif:

(1) Kepribadian, akhlak, dan keluhuran budi pada manusia yang (i)

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, (ii) memiliki kecerdasan dan kualitas bakat yang tinggi, dan (iii) memiliki kesehatan yang baik. (2) Manusia yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mewujudkan nilai-Pancasila, setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang mampu tumbuh dan berkembang secara pribadi, ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara, yang peduli terhadap kesejahteraan tetangganya dan dunia pada umumnya, dan yang menghargai lingkungan alam.

Dasa Darma merupakan rangkuman dari tujuan pembinaan kepramukaan.

Anggota Gerakan Pramuka dapat menggunakan Kode Kehormatan ini sebagai pedoman bagaimana harus bertindak dalam segala aspek kehidupan mereka. Pendidikan nilai dan karakter merupakan bagian integral dari pengalaman kepramukaan.

c. Sejarah Kepramukaan

Sebagaimana Jana T. Anggadireja, dkk. (2011:21) menunjukkan, sejarah dapat berfungsi sebagai cerminan masa kini dan batu loncatan untuk penciptaan masa depan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang bagaimana pramuka muncul:

1) Sejarah Pramuka Dunia

Menurut Sunardi (2016:32), peluncuran buku *Scouting For Boys* menandai momen penting dalam sejarah kepanduan di seluruh dunia,

menginspirasi generasi muda di seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam apa yang kemudian dikenal sebagai gerakan kepanduan (*Boy Scouts*). Tahun 1908, Sir Robert Baden Powell menerbitkan *Scouting for Boys*.

Kepanduan adalah program nasional yang membantu kaum muda berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Organisasi kepemudaan ini didirikan di Inggris pada 1907 oleh Sir Robert Baden-Powell, yang mendapatkan inspirasi untuk program intinya dari dua kelompok lain yang sudah ada: Sons of Daniel Boone, yang didirikan oleh ilustrator sejarah alam Daniel Carter Beard, dan Woodcarft Indian, yang didirikan oleh penulis Inggris kelahiran Kanada Ernest Thompson. Sekarang ada lebih dari 140 negara di mana Pramuka secara aktif dipraktikkan. Konferensi Dunia Pramuka diadakan setiap dua tahun dan menyatukan pramuka dari seluruh dunia. Pramuka Dunia memiliki sekretariat mereka di Jenewa, Swiss. Setiap empat tahun, pertemuan besar di seluruh dunia yang dikenal sebagai Jambore berlangsung. 4 Banyak negara, termasuk Amerika Serikat pada tahun 1910, telah meluncurkan organisasi kepanduan mereka sendiri sejak awal didirikan oleh Sir Baden Powell di Inggris. Kegiatan seperti pramuka cenderung menghabiskan banyak waktu di luar. Perkemahan adalah pokok inisiatif layanan lingkungan, agama, pertanian, sosial, dan masyarakat. Pramuka, misalnya, terlibat aktif dalam pengabdian masyarakat selama Perang Dunia II (1939-1945).

Kegiatan berkisar dari belajar lebih banyak tentang hewan dan tumbuhan hingga berenang, pertolongan pertama, slogan, dan banyak lagi.

2) Sejarah Pramuka di Indonesia

Menurut Jana T. Anggadireja dkk. (2011: 210), Nederland Indische Padvindere Vereeniging (NIPV), juga dikenal sebagai Persatuan Pramuka Hindia Belanda, didirikan oleh Belanda ketika Indonesia masih menjadi jajahan Hindia Belanda. Mengikuti bimbingan Baden Powell, pemimpin pergerakan nasional mendirikan organisasi kepanduan dengan tujuan menghasilkan warga negara Indonesia yang lebih cakap yang dapat menjadi kader dalam pergerakan nasional. Sunardi (2018:37) mengklaim bahwa negara kita pertama kali tertarik dengan organisasi kepanduan sekitar waktu ini; dan bahwa, karena daya tarik kepanduan di seluruh dunia, kelompok-kelompok ini dengan cepat diadopsi oleh negara kita. Anak-anak muda kita membutuhkan sebuah kelompok yang dapat menampung harapan-harapan mereka terhadap negaranya.

Menurut Anggadireja, dkk. (2016: 23) pada masa pendudukan Jepang, penguasa Jepang melarang keberadaan organisasi kepanduan. Kemudian pada masa kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), di Surakarta berdiri Pandu Rakyat Indonesia (PARI) pada tanggal 28 Desember 1945 sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di wilayah Republik Indonesia. Namun, menjelang tahun 1961, kepanduan

Indonesia terpecah-pecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan dengan 500.000 anggota, sehingga membuat keadaan menjadi lemah dan tidak kondusif dalam gerakan kepanduan. Pada tahun 1961, Gerakan Kepanduan Indonesia memasuki keadaan baru dengan nama Gerakan Praja Muda Karana. Semua organisasi kepanduan melebur ke dalam Gerakan Pramuka dan menetapkan Pancasila sebagai dasar Gerakan Pramuka. Gerakan pramuka sebagai satu-satunya badan di wilayah NKRI yang diperbolehkan menyelenggarakan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia. Gerakan pramuka bertujuan mendidik anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia agar tercipta anggota masyarakat yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Semangat menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang tumbuh di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan terus berkobar. Maka pada tanggal 14 Agustus 1961 untuk pertama kalinya Gerakan Pramuka digelar secara nasional di Jakarta, dalam sebuah upacara besar di depan Istana Merdeka di hadapan Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia. “Pada upacara besar ini, Negara menganugerahkan sebuah PANJI kepada Gerakan Pramuka, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 448 tahun 1961 tentang Penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja

Muda Karana. Jadi apakah Kepramukaan itu? Menurut Lord Baden Powell (terjemah) yaitu: “Kepramukaan itu bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari dengan tekun, bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-naskah dari suatu buku. Bukan! Kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama, mengadakan pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan, dan kesediaan untuk memberi pertolongan bagi yang membutuhkannya”.¹⁰ Dari penjelasan Baden Powell tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Kepramukaan adalah suatu permainan yang mengandung pendidikan mental dan pembangunan karakter. Dengan pendidikan karakter, Gerakan Pramuka dapat memberikan sumbangsih positif terhadap pengembangan negara Indonesia dengan penyemaian benih-benih calon pemimpin yang patriotis.

d. Motto, Lambang Gerakan Pramuka

1) Motto Gerakan Pramuka

Setiap anggota Gerakan Pramuka melakukan suatu kegiatan, mereka harus siap mental untuk menerapkan kode kehormatan Pramuka, oleh karena itu motto Gerakan Pramuka merupakan komponen integral dari proses pendidikan. "Satyaku Kuidharmakan Dharmaku Kubaktikan" adalah semboyan resmi Gerakan Pramuka yang tidak pernah berubah. Tidaklah cukup hanya mengulang moto Gerakan

Pramuka kepada anak-anak; sebaliknya, kita harus secara terus menerus menanamkannya kepada setiap peserta didik agar motto dapat meresap seiring waktu. Dengan menggunakan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, guru dapat membantu siswa menginternalisasi slogan Gerakan Pramuka dan menjadi warga negara yang lebih baik. Karena anak-anak lebih dipengaruhi oleh cara hidup yang patut diteladani daripada instruksi apa pun yang mungkin Anda berikan kepada mereka. Motto Gerakan Pramuka berfungsi sebagai sumber inspirasi untuk merencanakan ke depan dan siap untuk apa pun. Agar seorang Pramuka senantiasa menjadi aset bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan bangsa atau negara dimana dia berada.

2) Lambang Gerakan Pramuka

Sesuai dengan Kepres RI No. 448 Tahun 1961 yang dikeluarkan pada 14 Agustus 1961, Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, menganugerahkan kepada organisasi Gerakan Pramuka Panji Pendidikan Nasional Gerakan Pramuka Indonesia. Lambang Gerakan Pramuka berfungsi sebagai simbol permanen yang mewakili keyakinan setiap Pramuka. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengeluarkan Surat Keputusan No. 06/KN/72 tahun 1972, yang secara resmi menunjuk lambang ini. Spanduk, bendera, papan nama kuarter dan satuan, serta perlengkapan identitas dan administrasi, semuanya dapat memuat lambang Gerakan Pramuka.

Lambang Pramuka digunakan sebagai alat pengajaran untuk memastikan bahwa Pramuka tidak pernah melupakan maknanya dan dapat menerapkan pengetahuan baru mereka untuk digunakan di rumah, sekolah, komunitas, dan lainnya.

e. Sistem Pendidikan Kepramukaan

Yang dimaksud sistem adalah cara menata dan mengatur yang berkaitan dan selalu berkesinambungan. Sistem pendidikan dalam Gerakan Pramuka adalah sistem yang mengatur dan menata proses pendidikan bagi anggota Gerakan Pramuka.

Gerakan Pramuka merupakan wadah pendidikan non formal. Gerakan Pramuka menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan (PDMPK). Proses pendidikan Kepramukaan pada hakikatnya berbentuk kegiatan menarik yang mengandung pendidikan, bertujuan pendidikan, dilandasi nilai-nilai pendidikan, dilaksanakan di luar lingkungan sekolah.

Sesuai dengan gagasan pendiri Gerakan kepanduan Lord Boden Powell, dituangkan dalam buku *Scouting For Boys*, pada dasarnya pendidikan ini ditujukan kepada pembinaan anak-anak dan pemuda, bukan untuk orang dewasa. Namun untuk menunjang keberhasilan pembinaan peserta didik itu, diperlukan adanya pendidikan bagi orang dewasa, yang akan berperan sebagai pamong dengan sikap sesuai dengan sistem among, membawa peserta didik kepada tujuan Gerakan Pramuka.

Karena itulah maka fungsi pendidikan Kepramukaan akan berbeda

yaitu untuk anak-anak dan pemuda berfungsi sebagai permainan atau kegiatan yang menarik, sedangkan bagi orang dewasa merupakan pengabdian dari para sukarelawan.

1) Sistem pendidikan untuk peserta didik

Proses pendidikan bagi peserta didik ditujukan pada pencapaian tujuan Gerakan Pramuka, proses pendidikan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk peserta didik, dalam lingkungan alam mereka sendiri, dipimpin oleh mereka sendiri, tetapi dibawah bimbingan dan tanggung jawab orang dewasa sebagai Pembinaanya.

Proses pendidikan bagi peserta didik ini diatur dalam Syarat-Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Syarat-Syarat Kecakapan Khusus (SKK), serta Pramuka Garuda. Syarat-Syarat Kecakapan Umum (SKU) adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap anggota Pramuka, Syarat-Syarat Kecakapan Khusus (SKK) adalah syarat pilihan yang dapat dipilih secara bebas oleh masing-masing Pramuka.

Melalui pemenuhan Syarat-Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Syarat-Syarat Kecakapan Khusus (SKK) peserta didik secara tidak langsung dibawa bergerak, setingkat demi setingkat menuju ke tujuan Gerakan Pramuka. Berikut uraian tentang golongan dan tingkatan dalam setiap golongan:

- (a) Pramuka Siaga (usia 7-10 tahun) ada tiga tingkat Syarat-Syarat Kecakapan Umum (SKU) yaitu:

(1) Siaga Mula

(2) Siaga bantu

(3) Siaga Tata

Pada tingkat Siaga Bantu, seorang Pramuka Siaga dapat mencapai Syarat-Syarat Kecakapan Khusus (SKK) sebanyak-banyaknya, sesuai dengan minat, bobot dan pilihannya. SKK Siaga hanya ada satu tingkat, yang terdiri dari berbagai kecakapan. Anggota Siaga Tata yang memenuhi kecakapan dan persyaratan tertentu bisa mencapai Pramuka Siaga Garuda.

(b) Pramuka Penggalang (usia 11-15 tahun)

(1) Penggalang Ramu

(2) Penggalang Rakit

(3) Penggalang terap

Sesudah tingkat Penggalang Rakit, seorang Pramuka Penggalang bisa mencapai Syarat-Syarat Kecakapan Khusus (SKK) sesuai dengan pilihannya. Seorang Penggalang Terap yang telah memenuhi kecakapan dan persyaratan, bisa mencapai Pramuka Penggalang Ganda

(c) Pramuka Penegak (usia 16-20 tahun)

(1) Penegak Bantara

(2) Penegak Laksana

Pramuka Penegak Bantara maupun Penegak Laksana, keduanya dapat mencapai Syarat-Syarat Kecakapan Khusus (SKK) sesuai

pilihannya. Seorang Penegak Laksana yang memenuhi syarat tertentu dapat mencapai Pramuka Penegak Ganda

- (d) Pramuka Pandega (usia 21-25 tahun) terdapat satu tingkat Syarat-Syarat Kecakapan Umum (SKU) saja, yaitu Pandega. Setelah dilantik menjadi Pramuka Pandega ia dapat mencapai Syarat-Syarat Kecakapan Khusus (SKK) sesuai pilihannya. Pramuka Pandega yang memenuhi syarat tertentu, bisa mencapai Pramuka Pandega Garuda.

2) Sistem pendidikan bagi orang dewasa

Pendidikan bagi orang dewasa dalam Gerakan Pramuka ditujukan kepada pemberian bekal kemampuan, agar orang itu dapat mengabdikan dirinya secara sukarela dan aktif menjalankan kewajibannya sebagai Pembantu Pembina Pramuka, Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pembantu Andalan, Andalan, Anggota Majelis Pembimbing dan Staf Kwartir Pendidikan formal bagi orang dewasa berbentuk kursus-kursus, baik di dalam maupun di luar Gerakan Pramuka. Pendidikan itu diatur sesuai dengan kebutuhan orang dewasa yang bersangkutan. Adapun bentuk-bentuk kursus-kursus itu sebagaimana akan penulis uraikan sebagai berikut:

- a) Kursus Orientasi dilaksanakan untuk anggota dewasa Pramuka.

Kursus orientasi sesuai dengan lamanya kursus, terbagi menjadi tiga macam:

- (1) Kursus Orientasi Singkat

(2) Kursus Orientasi Sedang

(3) Kursus Orientasi Lengkap

Kursus orientasi bertujuan memberi cukup gambaran tentang pendidikan kepramukaan, sehingga masyarakat mempunyai citra yang positif tentang Gerakan Pramuka, menggugah masyarakat agar mau memberi dukungan dan bantuan kepada Gerakan Pramuka.

b) Kursus Pembina Pramuka Mahir

Kursus ini ditujukan bagi pembina yang akan membina peserta didik secara langsung, yaitu para Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka. Selain dalam rangka kaderisasi, Pramuka Penegak dan Pandega pun dapat dibenarkan mengikuti kegiatan ini, bahkan dianjurkan untuk mengikuti Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar saja.

Kursus ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar disingkat KMD, selama 90 jam pelajaran
- 2) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjut yang disingkat KML, selama 100 jam pelajaran.

Kursus ini diarahkan agar Para Pembina Pramuka dapat membina peserta didik sesuai dengan hakikat Gerakan Pramuka dan penggunaan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.

c) Kursus Pelatih Pembina Pramuka

Kursus ini ditujukan bagi para Pembina Mahir (lanjutan) yang berbakat dan berkeinginan menjadi Pelatih Pembina Pramuka.

Kursus ini dibedakan menjadi dua tingkat, yaitu :

- 1) Kursus Pelatih Pembina Pramuka Dasar (KPD)
- 2) Kursus Pelatih Pembina Pramuka Lanjutan (KPL)

Kursus Pelatih ini bertujuan membentuk tenaga yang mampu dan cakap melaksanakan pendidikan formal dan informal untuk anggota dewasa dalam Gerakan Pramuka.

d) Kursus-kursus untuk "petugas" dalam Gerakan Pramuka, antara lain:

- 1) Kursus Pengelola Kwartir.
- 2) Kursus Andalan.
- 3) Kursus Pamong Satuan Karya.
- 4) Kursus Perlebahan.
- 5) Kursus Instruktur.
- 6) Kursus Pendidikan dan Kependudukan.
- 7) Kursus Kader Koperasi.
- 8) Kursus Ketrampilan Penyediaan Air bersih.

Peserta kursus ini diharapkan sudah pernah mengikuti Kursus Mahir Dasar. Selesai mengikuti kursus mereka mendapat surat keterangan dan diharapkan mereka mampu melaksanakan tugasnya masing-masing.

Dari penjelasan diatas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pendidikan dalam Gerakan Pramuka terdiri dari sistem pendidikan bagi peserta didik dan bagi orang dewasa. Sistem pendidikan peserta didik bertujuan untuk membina generasi muda agar menjadi insan kamil baik sebagai diri pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan bagi anggota dewasa bertujuan untuk pengabdian orang dewasa dalam mengembangkan mutu pendidikan bagi peserta didik dan bagi anggota dewasa itu sendiri guna menunjang keberhasilan Tujuan Gerakan Pramuka.

f. Proses Pendidikan Kepramukaan

Sesuai dengan Permendikbud No 63 tahun 2014 ekstra kurikuler kepramukaan dilaksanakan dengan 3 (tiga) model antara lain:

1) Model Blok

Merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan sekali dalam setahun dan diberi penilaian umum

2) Model aktualisasi

Adalah kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Keperamukaan secara rutin, terjadwal dan diberikan penilaian formal

3) Model regular

Adalah kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan.

3. Pengertian Pendidikan Karakter

a. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter berasal dari dua suku kata: *ed* dan *char*. Definisi kedua istilah ini berbeda. Fokus pendidikan adalah pada tindakan, sedangkan fokus karakter adalah pada keberadaan. Dengan kata lain, karakter unggul dapat dikembangkan melalui sekolah. Fadillah dan Khorida (2014):16. Pendidikan karakter, seperti yang didefinisikan oleh Gaffar, adalah proses menanamkan seperangkat nilai-nilai inti dalam diri seseorang (siswa) ke titik di mana mereka menjadi intrinsik tindakan orang tersebut. Yaitu: (Fadillah & Khorida, 2014:22). Menurut pengertian ini, tujuan pendidikan karakter adalah menanamkan prinsip-prinsip moral pada anak-anak sehingga menjadi bagian integral dari kesadaran diri dan tindakan mereka sehari-hari.

Sementara itu, pendidikan karakter didefinisikan oleh Mulyasa (2012: 69) sebagai metode mengajar siswa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Prinsip-prinsip ini termasuk menghormati Allah, Tuhan YME, sesama manusia, alam, komunitas dan bangsa yang lebih besar.

Menurut Anugerah et al. (2019: 93), Permendikbud No. 20 Tahun 2018, pendidikan karakter didefinisikan sebagai gerakan pendidikan di sekolah dengan tujuan mengembangkan karakter peserta didik melalui penanaman ketentraman batin dan kebahagiaan lahiriah. Agama, cinta tanah air, kemandirian, dan pengabdian masyarakat adalah lima pilar

pendidikan karakter.

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu proses atau sistem untuk mengajar siswa untuk mengembangkan sifat-sifat budi pekerti yang akan melayani mereka dengan baik dalam hubungan mereka dengan diri mereka sendiri, Tuhan, dan sesama warga negara.

b. Tujuan Pendidikan Karakter

Ada nilai dalam mempelajari semua jalur. Begitu pula dengan pendidikan karakter. Menurut Kesuma (Fadillah & Khorida.2014:24), berikut beberapa tujuan pendidikan karakter, khususnya dalam konteks pendidikan:

- 1) Memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan.
- 2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah
- 3) Membangun koneksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggungjawab pendidikan karakter secara bersama.

Namun, ketiga tujuan ini bukan satu-satunya yang ingin dicapai oleh pendidikan karakter. Tujuan pendidikan adalah menanamkan dalam diri peserta didik (1) kemampuan empati dan kasih sayang

sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa, (2) berkembangnya kebiasaan dan perilaku yang terpuji sesuai dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya religius bangsa, (3) penanaman rasa kepemimpinan dan tanggung jawab di kalangan siswa sebagai calon pemimpin bangsa, dan (4) penanaman kemampuan siswa untuk tumbuh menjadi anggota masyarakat yang produktif, mandiri, dan berjiwa patriotik.

c. Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter

Setidaknya ada 8 (delapan) faktor yang berkontribusi terhadap nilai pendidikan karakter, seperti yang dikemukakan oleh Koesoma (Fadillah & Khorida, 2014: 35-39): (1) pentingnya kebajikan: orang dihargai jika menjalani kehidupan yang layak dan melakukan perbuatan baik seperti jujur, mengambil tanggung jawab, dan mematuhi hukum dan peraturan komunitas dan sekolah mereka. (2) Nilai estetika: Secara historis, istilah "nilai estetika" terutama mengacu pada daya tarik visual luar dari hal-hal seperti seni, arsitektur, dan sastra. Ketiga, perlunya etos kerja yang kuat, yang diupayakan oleh sekolah dalam diri anak dengan mendorong mereka untuk bekerja keras dan tidak bergantung pada orang lain, nilai perjuangan, nilai demokrasi, dan nilai patriotisme (nilai patriotisme). Bagian dari konsep di balik menciptakan masyarakat yang lebih adil adalah keyakinan bahwa perbedaan pendapat dapat dan harus didiskusikan, dirundingkan, dan diselesaikan secara damai. (6) pentingnya persatuan: jika siswa diajari nilai bekerja sama sebagai satu

kesatuan, negara akan kuat dan tahan terhadap pengaruh luar. (7) Moral adalah seperangkat prinsip inti yang harus ditanamkan dan dibiasakan untuk semua anak. Konsep moralitas mengacu pada pertanyaan tentang kebaikan dan kejahatan. (8) nilai-nilai kemanusiaan: mengajarkan anak untuk selalu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri.

d. Strategi Implementasi Pendidikan Karakter

Beberapa pendekatan digunakan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter. Metode diberikan dalam bentuk tugas, rutinitas, pelajaran, bimbingan, atau bahkan hanya dengan memberikan contoh yang baik. Pendekatan yang berbeda sekarang digunakan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan pribadi siswa. Metode serupa dapat ditemukan dalam pendidikan kepramukaan yang menekankan pada kemandirian, kesederhanaan, kebersamaan, dan keimanan kepada Yang Maha Kuasa. Permendikbud No. 63 Tahun 2014 menetapkan bahwa Pendidikan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib masuk dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Oleh karena itu, jelas bahwa pendidikan karakter dapat dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal (seperti Pendidikan Pramuka).

4. Disiplin

a. Pengertian Disiplin

Menurut Asmani (2013), 37, disiplin adalah “suatu perbuatan yang menunjukkan perilaku tertib dan taat pada berbagai peraturan dan ketentuan.” Daryanto (2013: 49) berpendapat bahwa disiplin pada dasarnya adalah pengendalian diri dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma yang dipaksakan oleh diri sendiri dan yang dibuat oleh keluarga, sekolah, masyarakat, negara, atau agama seseorang. Disiplin diri adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral sendiri, tanpa harus berkonsultasi atau menerima persetujuan dari orang lain. Menurut Gunawan (2014: 241), nilai-nilai ketekunan, menghargai waktu, dan keberanian melakukan hal yang benar merupakan manifestasi disiplin, yang menuntut setiap orang untuk selalu berpegang pada prinsip, patuh, dan konsisten dengan aturan yang berlaku. ditetapkan dan disepakati bersama. Wiyani (2014: 160) mengemukakan bahwa disiplin adalah usaha pengajar untuk menanamkan pengendalian diri dan perilaku taat aturan pada peserta didik. Karena dijiwai oleh kemauan untuk melakukan hal yang benar dan bukan oleh komponen ketakutan akan konsekuensi, disiplin yang dilaksanakan merupakan wujud dari sikap dan perilaku yang mematuhi aturan.

b. Unsur Disiplin

Menurut Hurlock (1978:84), disiplin terdiri dari bagian-bagian berikut:

- 1) Pentingnya aturan sebagai norma perilaku. Peraturan dibuat untuk membantu anak-anak dalam mengembangkan karakter moral dan membatasi tindakan yang tidak pantas.
- 2) Akibat dari pelanggaran hukum. Ketika siswa dihukum karena melanggar peraturan, itu agar mereka dapat memahami perbedaan antara perilaku yang pantas dan tidak pantas dan berhenti melakukan apa pun yang mereka lakukan sebelumnya.
- 3) Penguatan positif sesuai dengan hukum dan kebijakan yang ada. Pujian, senyum hangat, atau tepukan hangat di punggung sama bermaknanya dengan tanda penghargaan materi apa pun. Tujuan memberi hadiah kepada anak-anak adalah membuat mereka mengikuti aturan.
- 4) Kualitas yang konstan atau konsisten. Aturan yang diajarkan dan diterapkan secara konsisten, dengan konsekuensi yang konsisten untuk pelanggaran aturan dan penguatan positif untuk perilaku patuh. Tujuan mempertahankan pola insentif untuk perilaku yang sesuai dan hukuman untuk perilaku yang tidak pantas adalah untuk membantu anak memahami hubungan antara keduanya.

c. Indikator Disiplin

Disiplin dapat ditunjukkan dengan empat cara, menurut Wibowo (2012:101): 1) tepat waktu, 2) membiasakan mengikuti aturan, 3) berpakaian rapi, dan 4) memanfaatkan fasilitas dengan baik. Daryanto

(2014: 41) lebih lanjut mengategorikan indikasi disiplin belajar menjadi empat kategori: 1) kepatuhan pada norma sekolah, 2) kepatuhan pada kegiatan pembelajaran, 3) penyelesaian tugas yang diberikan, dan 4) disiplin belajar di rumah. Penanda kedisiplinan belajar siswa yang dikemukakan Moenir, A. (2010: 131) lebih lanjut adalah sebagai berikut: Sebagai langkah awal, tanamkan kebiasaan tepat waktu dengan selalu memulai dan menyelesaikan tugas sekolah, pekerjaan rumah, dan kegiatan akademik lainnya tepat waktu. b) Jangan bolos sekolah atau mendapat masalah karena absen. c) Menyelesaikan semua tugas sebelum tanggal jatuh tempo.

Indikator nilai kedisiplinan siswa sekolah dasar seperti yang dijelaskan oleh Depdiknas (2010: 33) adalah sebagai berikut. A. Pastikan Anda tiba di sekolah dan kelas Anda tepat waktu. B. Lakukan pekerjaan untuk kelasnya yang termasuk dalam bidangnya. B. Duduklah di area yang disediakan. D. Ikuti semua peraturan kelas dan sekolah. Berpakaian bersih dan sopan (e). F. Bermain dengan pedoman yang ditetapkan. F. Selesaikan semuanya tepat waktu. H. Bertanggung jawab satu sama lain dalam kelompok sosial untuk memastikan keberhasilan penyelesaian semua proyek kelas. Untuk menjaga ketentraman di kelas, yaitu selalu, ajaklah teman-temanmu. Jika Anda memiliki teman yang melanggar peraturan, ingatkan dia dengan lembut (dan tidak menyinggung).

5. PKn dan Dimensi Pembelajaran PKn

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Mujiyanto, 2016:1 menyampaikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat *multifaset* dengan konteks *lintas bidangkeilmuan*, namun secara filsafat keilmuan ia memiliki *ontology* pokok ilmu politik, khususnya konsep “*political democracy*” untuk aspek “*duties and rights of citizen*” (Chreshore:1886). Dari ontologi pokok inilah berkembang konsep “*civics*”, yang secara harfiah diambil dari bahasa Latin “*civicus*” yang artinya warga negara pada jaman Yunani kuno, yang kemudian diakui secara akademis sebagai embrionya “*civic education*”, yang selanjutnya di Indonesia diadaptasi menjadi “pendidikan kewarganegaraan” (PKn).

Secara epistemologis, PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan dari salah satu dari lima tradisi “*social studies*” yakni “*citizenship transmission*” (Barr, Barrt, dan Shermis:1978). Saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu “*body of knowledge*” yang dikenal dan memiliki paradigma sistemik yang didalamnya terdapat tiga domain “*citizenship education*” yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural” (Winataputra:2003). Ketiga domain itu satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi “*civic virtue and culture*” yang mencakup “*civicknowledge*,

civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, dan civic competence (CCE:1998).

Oleh karena itu, ontologi PKn saat ini sudah lebih luas dari pada embrionya, sehingga kajian keilmuan PKn, program kurikuler PKn, dan aktivitas sosiokultural PKn bersifat multidimensional. Sifat multidimensionalitas inilah yang membuat bidang studi PKn dapat disikapi sebagai nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak azasi manusia, dan pendidikan demokrasi. Bagi negara kita, Indonesia, arah pengembangan PKn tidak boleh keluar dari landasan ideologis Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan operasional Undang-undang Sisdiknas yang berlaku saat ini, yakni UU Nomor 20 tahun 2003. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bentuk dari domain kurikuler PKn. Sesuai dengan namanya, PKn merupakan mata pelajaran dalam kurikulum SD, sebagai mata kuliah dalam program pendidikan tenaga kependidikan, PKn mempunyai misi sebagai pendidikan nilai Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan dan sebagai "*subject-specific pedagogy*" atau pembelajaran materi subjek untuk guru PKn, sebagai mata pelajaran di SD, PKn mempunyai misi sebagai pendidikan nilai Pancasila dan kewarganegaraan untuk warga negara muda usia SD.

Mujiyanto, 2016:2 menjelaskan bahwa pembelajaran PKn di

SD adalah pengembangan kualitas warga negara secara utuh, dalam aspek-aspek:

- 1) Kemelek-wacanaan kewarganegaraan (*civic literacy*), yakni pemahaman peserta didik sebagai warga negara tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia serta menyesuaikan perilakunya dengan pemahaman dan kesadaran itu;
- 2) Komunikasi sosiokultural kewarganegaraan (*civic engagement*), yakni kemauan dan kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk melibatkan diri dalam komunikasi sosial-kultural sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- 3) Pemecahan masalah kewarganegaraan (*civic skill and participation*), yakni kemauan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik sebagai warga negara dalam mengambil prakarsa dan/atau turut serta dalam pemecahan masalah sosialkultur kewarganegaraan di lingkungannya.
- 4) Penalaran kewarganegaraan (*civic knowledge*), yakni kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk berpikir secara kritis dan bertanggungjawab tentang ide, instrumentasi, dan praksis demokrasi konstitusional Indonesia.
- 5) Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (*civic participation and civic responsibility*), yakni kesadaran dan kesiapan peserta didik sebagai warga negara.

Menurut Mujiyanto, 2016:3 dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, terdapat pasal yang mengatur tentang Pendidikan Kewarganegaraan untuk tingkat satuan pendidikan. Negara untuk berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam berkehidupan demokrasi konstitusional. PKn untuk sekolah sangat erat kaitannya dengan dua disiplin ilmu yang erat dengan kenegaraan, yakni Ilmu Politik dan Hukum yang terintegrasi dengan humaniora dan dimensi keilmuan lainnya yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, PKn di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart dan good citizen*). Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pembelajaran PKn di SD lebih dititikberatkan pada penghayatan dan pembiasaan diri untuk berperan sebagai warga negara yang demokratis dalam konteks Indonesia. Untuk itu guru PKn harus menjadi model warga negara yang demokratis sehingga menjadi teladan bagi peserta didiknya. Bertolak dari berbagai pertimbangan, maka untuk pembelajaran PKn di SD tersebut seyogianya diorganisasikan sebagai berikut.

Pada jenjang SD kelas rendah (*lower primary*), yakni rentang

kelas 1-3, pengorganisasian materi pendidikan kewarganegaraan menerapkan pendekatan terpadu (*integrated*) dengan fokus model pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman (*experience oriented*) dengan memanfaatkan pola pengorganisasian lingkungan yang meluas (*expanding environment/community approach*). Tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan di kelas rendah ini adalah untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan pengertian awal tentang pentingnya kehidupan bermasyarakat secara tertib dan damai. Melalui pembiasaan para peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap dan berperilaku sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga masyarakat di lingkungannya secara cerdas dan baik (*good and smart citizen*). Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil bermain (*learning through gaming*), belajar sambil berbuat (*learning by doing*), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural di lingkungannya (*enculturation and socialization*). Pada jenjang SD kelas tinggi (*upper primary*) pengorganisasian materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sama dengan jenjang kelas 1-3 yakni menerapkan pendekatan terpadu (*integrated*) dengan model pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman (*experience oriented*) dengan pola pengorganisasian lingkungan meluas (*expanding environment/community approach*) dengan visi utama sebagai pendidikan nilai dan moral demokrasi (*democracy value and*

moraleducation). Perbedaannya, pada jenjang SD kelastinggi, pembelajaran sudah mulai dikenalkan mata pelajaran yang terpisah. Guru SD sebagai guru kelas membelajarkan lima mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn) secara terpisah. Namun, dianjurkan pula untuk beberapa kompetensi dasar, agar guru menerapkan pendekatan tematik (*integrated*) sesuai dengan memperhatikan prinsip kontekstual, aktualitas, dan kebutuhan peserta didik.

b. Dimensi Pembelajaran PKn

Signifikansi Pendidikan Kewarganegaraan tidak terlepas dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagaimana dikemukakan oleh Kardiman (2014:3). Hal ini terlihat pada sifat ontologis materi PKn. Oleh karena itu, konten Kewarganegaraan dapat dipecah menjadi tiga kategori berikut: pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan cita-cita kewarganegaraan. Pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan demokrasi, institusi pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, supremasi hukum, keadilan yang bebas dan obyektif, sejarah nasional, hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, dan hak politik adalah contoh topik yang dibahas dalam kelas PKn. 2) Aspek kewarganegaraan (keterampilan sipil), yaitu yang berkaitan dengan partisipasi efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Itulah mengapa sangat penting untuk memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan keterampilan seperti persuasi, pengaruh, pemantauan

operasi pemerintah, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pembangunan koalisi, dan manajemen konflik. Ketiga, penanaman moral, etika, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara sebagai hasil dari materi kuliah. Norma dan etika, nilai-nilai keadilan, demokrasi, kebebasan berbicara, dan keamanan adalah semua topik yang berkaitan dengan dimensi ini. Menurut Branson (dalam Kardiman, 2008: 47), Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang menumbuhkan pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sifat-sifat karakter yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis Kewarganegaraan (rasa kewajiban sipil).

Pengetahuan kewarganegaraan berbasis konten, terkadang dikenal sebagai "apa yang harus diketahui warga negara", mencakup mata pelajaran termasuk politik, pemerintahan, konstitusi, tujuan, cita-cita, dan prinsip demokrasi, hubungan negara dengan negara lain, dan peran warga negara. Pengetahuan kewarganegaraan merupakan dasar dari kompetensi kewarganegaraan, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan hak-hak seseorang dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang mandiri. Temperamen sipil, atau ciri-ciri kepribadian suatu komunitas dan anggota individunya, sangat penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan demokrasi konstitusional. Sifat dan bakat kewarganegaraan muncul secara bertahap dari didikan, pendidikan, dan keterlibatan seseorang dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kelompok masyarakat. cita-cita, pengetahuan,

keterampilan, dan budaya berdasarkan cita-cita nasional Indonesia, nilai-nilai Pancasila, dapat ditransfer secara efektif melalui ketiga bidang tersebut. Pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan secara lebih luas, harus menanamkan rasa prinsip-prinsip Pancasila.

Pembelajaran yang membekali orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat demokratis sangat penting, kata Mujiyanto (2016:15). Artinya, diperlukan beberapa bentuk pendidikan Kewarganegaraan yang berbeda, masing-masing dengan potensi untuk membina dan mempertahankan masyarakat demokratis. Pendidikan kewarganegaraan sebagai topik di kelas K-12 dan seminar perguruan tinggi harus berkembang dengan perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat selama transisi bangsa atau kemajuan menuju masyarakat sipil. Lingkungan memiliki andil dalam membentuk tuntutan dan kesulitan masyarakat modern, dan masyarakat modern memiliki andil dalam membentuk lingkungan.

Pembangunan karakter bangsa (*national character building*) yang menjadi prioritas utama di Indonesia sejak kemerdekaan negara dideklarasikan, tidak luput dari pengaruh pergeseran tersebut, dan harus direvitalisasi agar selaras dengan arahan dan pesan NKRI. Tujuan akhir dari proses pembangunan bangsa adalah untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yang menghargai demokrasi di semua tingkat kehidupan publik dan politik. Akibatnya, pendidikan kewarganegaraan dengan kerangka pembaruannya, sekali lagi dipandang sangat penting bagi

proses pembentukan karakter bangsa.

Tujuan dari konsep ulang pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menciptakan warga negara yang lebih bertanggung jawab dan aktif melalui pengajaran kecerdasan, tanggung jawab, dan keterlibatan sipil. Paradigma baru Kewarganegaraan menekankan pembinaan manusia yang berakal tidak hanya dalam ranah rasional dan intelektual tetapi juga dalam ranah spiritual, emosional, dan sosial. Sesuai dengan paradigma baru PKn, diperlukan strategi dan pendekatan pembelajaran yang unik untuk menumbuhkan masyarakat demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan. Penting untuk mendefinisikan kewarganegaraan demokratis sebelum melanjutkan pengembangan model pembelajaran yang diusulkan. Akibatnya, bab ini akan fokus pada dua tema utama: (1) warga negara yang demokratis, dan (2) pendidikan kewarganegaraan untuk warga negara yang demokratis. Pembaca diharapkan dapat (1) memahami tuntutan kualitas warga negara yang demokratis dan (2) mengajarkan PKn untuk kewargaan yang demokratis setelah mempelajari kehidupan warga negara yang demokratis dan bagaimana pembelajaran untuk menciptakan warga negara yang demokratis dalam paradigma PKn yang baru. Calon guru dan pendidik baru, yang mungkin kesulitan mengumpulkan sumber daya dan mengembangkan rencana pelajaran, harus membiasakan diri dengan paradigma baru Kewarganegaraan, yang menekankan pentingnya menghasilkan warga negara demokratis yang berkualitas tinggi.

B. Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mencari penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dalam menyelesaikan dan mengembangkan penelitian ini. studi yang relevan dengan yang satu ini adalah:

Salah satu penelitian tersebut adalah “Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Penanaman Pendidikan Karakter di SMK Negeri 1 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga” oleh Eshi Ismayaningrum (2016). Berdasarkan ajaran Trisatya dan Dasadarma Pramuka, penelitian ini menyimpulkan bahwa ekstrakurikuler kepramukaan SMK Negeri Bukateja membantu membentuk prinsip moral pada siswa sekolah tersebut. Selain itu, temuan penilaian keefektifan termasuk ketepatan sasaran program, pelaksanaan program, dan pemantauan program menyatakan bahwa ekstrakurikuler pramuka efektif dalam menanamkan karakter pada seluruh kegiatannya.

Kajian lainnya adalah “Pelaksanaan Kegiatan Pramuka Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa Anggota Gerakan Pramuka di SDN Sukun 3 Malang” oleh Moh. Imam Mukhlis (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ganjaran dan hukuman, instruksi yang jelas dan ringkas, serta pelatihan yang konsisten merupakan sarana yang efektif untuk membentuk perilaku disiplin. Penggabungan kegiatan kepramukaan ke dalam proses pembentukan kepribadian disiplin siswa telah berjalan sesuai rencana. Empat penanda disiplin, termasuk pengendalian diri selama proses pembelajaran, ketahanan terhadap penundaan, kemandirian siswa, dan prestasi

akademik, membuktikan hal ini.

Ketiga, “Pendidikan Karakter Disiplin Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di SDN Gedongkuning” (Dewi Evayanti, 2018). Berikut dapat disimpulkan dari kajian yang dilakukan dengan topik pendidikan karakter disiplin dalam kegiatan pramuka di luar hari sekolah reguler di SD Negeri Gedongkuning. Pada awal tahun ajaran, pembina menginisiasi proses kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai sarana pemberian pendidikan karakter disiplin. Rencana belajar, materi pelatihan untuk kegiatan mingguan, aturan dan konsekuensi, penjangkauan orang tua yang terpadu, dan buku kehadiran adalah bagian dari proses perencanaan. Kedua, semua tindakan yang dimaksudkan produk telah selesai dan dapat direplikasi dengan andal oleh siswa. Manajer telah menerapkan sistem disiplin yang mencakup aturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi. Siswa yang berada di taman bermain saat peluit dibunyikan, yang berpakaian sesuai dengan tingkat kelas mereka, dan yang telah mematuhi semua peraturan dan ketentuan adalah contoh norma disiplin yang ditunjukkan dalam data. Namun, masih ada kelas dengan siswa yang tidak disiplin. Masih ada anak-anak yang mengganggu teman sebayanya dengan membuat kegaduhan dan tidak mengenakan seragam lengkap saat kegiatan kemahasiswaan, terutama pada saat siaga. Pengendalian diri siswa terlihat pada umumnya pada saat mereka mengikuti kegiatan pramuka siswa di luar kelas. Ketiga, pramuka melakukan evaluasi materi (pengetahuan), keterampilan, dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Pembina melakukan tugas evaluatif selama kegiatan

ekstrakurikuler. Keempat, kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat mengajarkan berbagai nilai kedisiplinan, seperti pentingnya ketertiban dalam berbaris, ketaatan dalam mengikuti arahan pelatih, kesetiaan dalam mengenakan seragam yang benar, dan ketaatan pada peraturan. Sebagai keuntungan kelima, pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bagus karena membantu anak-anak melatih kepribadian mereka dan tumbuh sebagai manusia.

Keempat, “Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Pembentukan Karakter Siswa di SD Negeri 1 Kwaren” (Ranika Kusuma Wardani, 2018). Berdasarkan hasil penelitian ini, sebaiknya pembina merancang pembelajaran yang menekankan pada empat pilar pembinaan karakter yaitu Dwisatya, Dwidarma, Trisatya, dan Dasadarma. Selain itu, ekstrakurikuler adalah cara yang bagus untuk mengajarkan pelajaran hidup yang berharga seperti disiplin, kejujuran, keberanian, sportivitas, cinta tanah air, menghargai alam, menghargai negara sendiri, demokrasi, dan nilai kerja keras. Pelatih bertanggung jawab untuk mengawasi dan menilai pertumbuhan pribadi setiap siswa. Inisiatif penanaman supervisor untuk pendidikan karakter sejauh ini berhasil. Kehidupan sehari-hari sebagai Pramuka maupun di dalam kelas sama-sama meneguhkan nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, semangat, religius, sahabat setia, kesabaran, dan keberanian.

Kelima, penelitian berjudul “Upaya Peningkatan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka” oleh Vina Ameliasari dkk. (2022) adalah sumber kelima kami. Acara baris-berbaris, upacara, permainan,

perkemahan, dan perjalanan lintas negara hanyalah beberapa dari item kepramukaan yang menyampaikan nilai-nilai karakter, menurut penelitian ini. Kegiatan pembentukan karakter siswa dalam kepramukaan, seperti pemberian tugas, pemberian bimbingan, dan penegakan konsekuensi atas kinerja yang buruk, dapat menjadi rutinitas dari waktu ke waktu.

Anggatra Herucakra Aji (2016). Pendidikan Karakter dalam Ekstrakurikuler Pramuka di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Penelitian ini mendeskripsikan proses dan implementasi pembentukan karakter pada ekstrakurikuler pramuka SMP Negeri 1 Yogyakarta, serta menggali faktor pendukung dan penghambat serta strategi mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian: (1) Proses dan pelaksanaan pembinaan karakter pada ekstrakurikuler kepramukaan di SMP Negeri 1 Yogyakarta menggunakan berbagai metode. a) Pembelajaran interaktif progresif, b) Antar sistem, c) Idiom dasar. (2) Faktor pendukung yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dan Musyawarah Nasional Jumlah Gerakan Pramuka: 11/Munas/Hasil Gerakan Pramuka Tahun 2013 AD/ART Keputusan Sarana dan Prasarana, Antusiasme Mahasiswa, Pelatih Pramuka Profesional, Kurikulum Sekolah yang Membutuhkan Kepramukaan di Luar Kurikulum, dan Manajemen Kegiatan Pramuka di Luar Kurikulum yang Tepat. Kendalanya adalah keterbatasan anggaran sumber daya sekolah, dan sebagian siswa masih merasa Pramuka sebatas melakukan kegiatan sekolah saja, ditambah dengan kurangnya pengetahuan orang tua tentang kegiatan ekstrakurikuler. (3) Strategi sekolah

meliputi pendanaan seni pertunjukan, penyewaan sarana olahraga (GOR), pendanaan BOS, dukungan pendidikan, dan pertemuan rutin atau tidak teratur dengan orang tua siswa atau wali Ria Yuni Lestari (2016). Peran Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Mengembangkan Watak Kewarganegaraan Siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang sifat kewarganegaraan dari 43 kegiatan ekstrakurikuler dan proses kegiatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi studi kasus. Studi menunjukkan bahwa sifat kewarganegaraan terdidik meliputi sopan santun, menghormati hak individu orang lain, kepatuhan hukum, kejujuran, pemaaf, berpikir kritis, patriotisme, keberanian, dan pemaaf. Rekomendasi penelitian di sekolah memperhatikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk lebih mendukung pendidikan kewarganegaraan siswa.

Terakhir, Dyah Lisayanti (2014). Implementasi Kegiatan Pramuka Sebagai Estrakurikuler Wajib Berdasarkan Kurikulum 2013 dalam Upaya Pembinaan Karakter. Hasilnya menunjukkan bahwa: (1) Tujuh hal ditemukan dalam rencana. Artinya, Guru Pramuka belum bersertifikat. Belum ada program kerja. Tidak ada transparansi sarana. Kurangnya fasilitas pendukung; kewajiban ganda; izin mengikuti kegiatan pada jam kerja yang berlaku belum jelas. (2) Ada dua hal yang harus dilaksanakan. Artinya, kegiatannya tidak terlalu beragam dan tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan (RPK), program tahunan, program semester, kurikulum, materi kegiatan, dan evaluasi. (3) Dari hasil evaluasi ditemukan dua hal berikut. Mereka yang unggul dalam pekerjaan

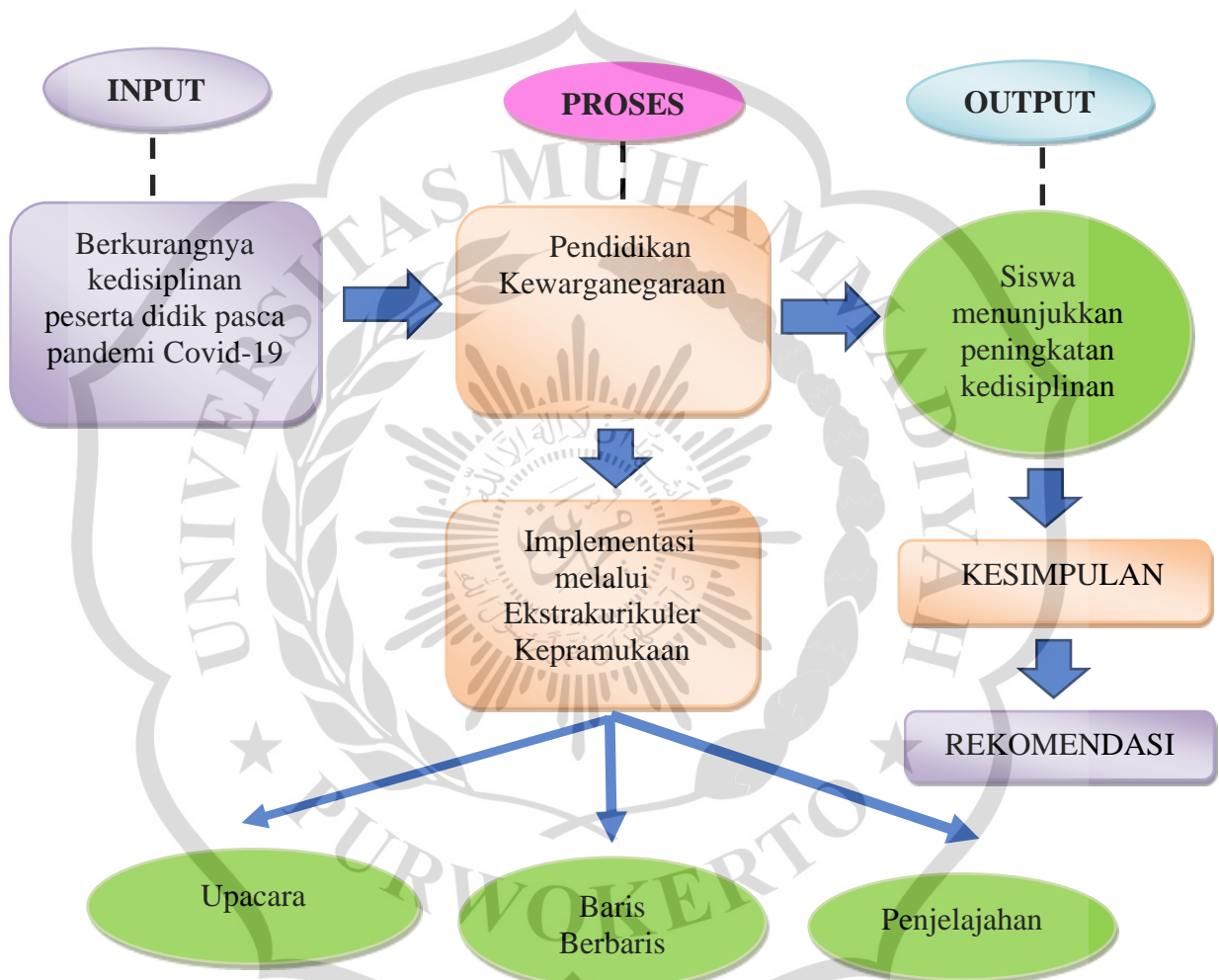
sehari-hari dan pekerjaan sampingan tidak mendapat kompensasi dan tidak dievaluasi secara berkala. Peneliti menyimpulkan bahwa pengintaian di SMPN2 Rembang secara umum baik. Sebagai kegiatan ekstrakurikuler, menyarankan untuk terlibat dalam kegiatan kepramukaan yang profesional dan bertanggung jawab.

C. Kerangka Berpikir

Guru dan kepala sekolah, khususnya, memiliki peran penting dalam membantu anak-anak pulih dari pandemi Covid-19, yang menyebabkan pergeseran perilaku dan sikap yang meluas di dalam tubuh siswa. Siswa yang telah belajar di rumah secara daring selama hampir dua tahun mulai mengabaikan disiplin yang dipraktikkan di sekolah, termasuk kewajiban mengenakan pakaian lengkap, tiba di sekolah sebelum pukul 07.00, memotong pendek rambut (untuk laki-laki), dan melakukan sholat dhuha sebelum mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kuasai seni mengajar, menahan diri dari berkelahi dengan teman, menghormati figur otoritas, dan bersikap baik kepada semua orang. Setelah instruksi tatap muka selesai, para murid kembali ke sekolah, di mana fakultas dan administrasi berangkat untuk membentengi tampilan pengendalian diri dan ketertiban yang sudah mengesankan dari para siswa.

Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah memasukkan pendidikan karakter ke dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kepramukaan. Adapun tujuan dari ekstrakurikuler Pramuka adalah untuk membantu kaum muda agar berkembang menjadi warga negara yang baik yang menghormati otoritas, setia

kepada negaranya, mematuhi peraturan, disiplin diri, patriotik, dan menjunjung tinggi cita-cita tertinggi Amerika Serikat. Karakter siswa, termasuk kedisiplinannya, merupakan hal yang dapat ditumbuhkan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka. Penjelasan diagram terlihat seperti ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir